

BAB III
PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI TURKI TERHADAP
PALESTINA

Pada Bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang kemenangan Erdogan, kemudian strategi Al-amiq Al-istiraji.

A. Kemenangan Erdogan

Kemenangan Recep Thayyep Erdogan diawali Erdoğan terpilih menjadi Presiden Turki ke 12 hasil pemilihan presiden Turki yang digelar pada 10 Agustus 2014. Erdoğan memenangi pemilihan presiden dengan perolehan 52 persen mengalahkan dua pesaingnya. Pada 28 Agustus, Erdoğan resmi dilantik menjadi Presiden Turki ke-12. Erdoğan dilantik di kantor kepresidenan di Ankara. Pelantikannya akan mengantarkan pada era baru di Turki karena dia diperkirakan akan mendesak dibuatnya konstitusi baru yang bisa menstransformasi negeri itu. Pengganti Erdogan pada kursi perdana menteri adalah Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoğlu. Para kepala negara sejumlah negara Eropa Timur, Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah akan menghadiri pelantikan Erdogan, termasuk Presiden Ukraina Petro Poroshenko.

Erdogan dalam memimpin Republik Turki untuk melanjutkan kebijakan Zero Enemy dengan seluruh negara dunia. Politik luar negeri Zero Enemy seperti ini yang memberikan keuntungan bagi posisi Turki di Eropa dengan status negara berkembang dan bahkan di Asia sebagai model atau contoh bagi negara-negara Timur Tengah untuk menuju kemajuan negara secara signifikan

melalui kerjasama internasional. Erdogan mengupayakan ideologi ini sebagai dasar terciptanya keamanan, ketentraman dan toleransi beragama atas masyarakat Turki yang penuh dengan heterogenitas dari suatu semboyan negara yang pada masa Attaturk hal itu tidak dapat dirasakan masyarakat Turki karena kuatnya militerisme negara dan tidak mau bersentuhan dengan Bangsa Arab. Hal ini membawa pengaruh dalam level pengambilan kebijakan internasional Turki. Munculnya gagasan ini akibat dari serangkaian sikap Perdana Menteri Erdogan, dia perlahan-lahan mencoba membangkitkan kembali ideologi damai, tanpa musuh dengan teman dekat ala Sufisme kedalam kehidupan masyarakat Turki.

Perubahan politik luar negeri Turki dari pro Israel kepada politik luar negeri Turki yang pro Palestina karena Erdogan yang memiliki karakteristik pemimpin yang cinta damai. Adanya upaya Endorgan dalam memimpin Republik Turki untuk melanjutkan kebijakan Zero Enemy dengan seluruh negara dunia menurut prinsip Sufisme yang cinta damai. Erdogan mengupayakan ideologi ini sebagai dasar terciptanya keamanan, ketentraman dan toleransi beragama. Selama masa pemerintahan Erdogan, mengingatkan kembali pada Mustafa Kemal (Ataturk). Pada tahun 1920, Ataturk melancarkan gelombang reformasi Turki untuk menyamakan Turki dengan Eropa. Ataturk berpendapat bahwa kedaulatan Turki di atas segalanya. Sama halnya dengan Erdogan yang memberikan pemikiran tegas bahwa “Turki Jalan Sendiri”. Sejak awal memimpin Erdogan sudah menyiapkan masyarakatnya

untuk memiliki jiwa merdeka dan menyakini bahwa kepentingan Turki ditentukan oleh masyarakat Turki sendiri²⁵.

Berdasarkan teori dalam psikologi politik gaya (karakteristik) kepemimpinan Erdogan termasuk independen aktif dimana fokus perhatian pada memelihara kemampuan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh dirinya sendiri dan pemerintahan, di dunia yang dipersepsikan terus menerus-menerus mencoba membatasi keduanya²⁶. Ketika Turki menjadi negeri berpenduduk muslim di Eropa dan “dibatasi” ketika berusaha menjadi anggota Uni Eropa. Turki menentang batas-batas tersebut dan memilih untuk fokus pada perbaikan dalam negeri seperti pendidikan, transportasi udara serta ekonomi yang menjadikan Turki tampil sebagai negara yang kuat, penting dan sejajar dengan negara-negara Eropa lainnya²⁷.

Konflik-konflik regional di wilayah negara-negara Timur Tengah pun menjadi hal yang sangat menarik, selain sulitnya menemukan titik temu perdamaian, tetapi juga adanya keterlibatan dari negara-negara di luar wilayah Timur Tengah, terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah Perang Dingin Usai, Amerika Serikat semakin memantapkan hegemoninya dikawasan Timur Tengah, baik secara ekonomi, politik, maupun militer. Amerika memanjakan beberpa negara Timur Tengah dengan berbagai fasilitas, dan teknologi canggih yang dimilikinya, sehingga mereka seolah-olah tidak punya

²⁵ http://www.kompasiana.com/deangga/gaya-kepemimpinan-erdogan-dalam-psikologi-politik_567bee0b369773e914ddd27b., diakses 21 November 2016.

²⁶ Hermann, Margaret G., Thomas Preston, dan Michael Young, 1996, *Who Leads Can Matter in Foreign Policimaking : A Framework for Leadership Analysis*. Paper Presented at the The Annual of the Intenational Studies Association, Sann Diego, 16-20.

²⁷ *Idem*

kekuatan untuk melawan Amerika dengan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap negara adidaya tersebut. Terbukti bahwa tidak sedikit negara-negara Arab yang menjadi sekutunya, bahkan mungkin hanya sebagian kecil saja yang kontra terhadap Amerika. Berbicara mengenai permasalahan di Timur Tengah, itu hanya sebagian kecil saja dari permasalahan yang ada, masih banyak permasalahan-permasalahan unik lainnya, termasuk ketegangan atau bahkan konflik diantara negara-negara Timur Tengah lainnya. Dan hal yang menarik adalah yang akhir-akhir ini terjadi antara Turki dan Israel. Hubungan kedua negara Timur Tengah ini mulai renggang seiring berjalannya waktu, terutama dalam bidang militer. Padahal selama ini hubungan antar keduanya berjalan cukup baik, terlebih lagi banyak kesamaan yang dimiliki²⁸.

Turki dikenal memiliki sejarah yang panjang mengenai keterlibatan dalam dunia politik internasional. Hal tersebut disebabkan wilayah Turki berada sangat strategis dalam percaturan politik dunia. Karena mengingat Turki pernah menjadi pusat pemerintahan yang besar seperti Kerajaan Romawi di Konstantinopel (Istanbul) dan juga Kerajaan Seljuk yang berpusat di wilayah Konya. Kemudian disusul dengan pemerintahan Republik Turki yang sangat modern dibandingkan dengan negara Arab lainnya. Sehingga tidak mengherankan jika Napoleon Bonaparte pernah berkata “jika dunia ini adalah sebuah negara maka Konstantinopel (Istanbul) adalah ibukotanya. Perubahan model pemerintahan dari Kesultanan Utsmani menjadi Republik Turki yang berhaluan sekuler di kawasan Timur Tengah. Menjadikan negara ini selalu

²⁸ Israel Cemas Atas Perubahan Kepemimpinan Militer Turki”, dalam <http://www.islamiccentretangsel.com>, diakses 4 November 2016, jam 15.00 WIB.

merasa berhaluan Eropa daripada Asia, di antara negara-negara Arab lainnya. Sehingga tidak mengherankan, bahwa Turki sangat berkeinginan menjadi anggota Uni Eropa. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa ide sekuler telah membawa negara ini menuju kemodernan layaknya negara-negara di Benua Biru lainnya. Politik luar negeri Turki yang moderat dengan mengusung ide-ide republik membawa pengaruh hubungan yang cukup besar kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Eropa.

Sebagai kekuatan politik yang terus mengalami kebangkitan, Turki tidak ragu-ragu lagi untuk menempatkan dirinya di tengah kontroversi besar. Turki adalah pemain besar dalam penciptaan perdamaian Palestina dan telah menengahi pembicaraan tidak langsung antara Suriah dan Israel. Selain itu, Turki juga berperan aktif ikut mengupayakan mediasi dalam mengatasi krisis nuklir Iran, dan Ankara mendukung armada yang baru-baru ini mencoba untuk memecahkan blokade Israel di Gaza yang secara langsung kesemuanya ikut menaikkan posisi tawar menawar Turki di antara negara-negara dunia. Kebijakan baru AKP yang condong ke Timur Tengah berpijak dari rasa percaya diri tadi. Ketika PM Recep Tayyip Erdogan secara terbuka mengecam Israel, dia sejatinya tengah memalingkan perhatiannya kepada pasar Arab. Sebuah analisis sederhana menyebutkan bahwa AKP dapat berpaling dengan cepat dari IMF karena milyaran dollar investasi Arab mengalir ke Turki. Pernyataan keras AKP selama insiden Gaza flotilla adalah bagian yang dapat digambarkan sebagai kebangkitan neo Usmanisme.

Bangkitnya kelas politik-ekonomi baru ini dimotivasi oleh nilai-nilai tradisionalisme Islam dan kehausan mereka atas pasar-pasar baru. Raja Salman yang kini menjadi pemimpin terpopuler di Arab dan dunia Islam – mendampingi popularitas pemimpin Turki Erdogan – membentuk dua poros kebijakan yang memaksa membentuk peta jalan baru dalam dinamika politik dan sosial di Timur Tengah. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan secara terbuka mengkritik kebijakan Israel dan mendapat simpati dari dunia Arab. Sejak serangan militer Israel ke Jalur Gaza tahun 2008 dan 2009, Turki memang mulai menjauhkan diri dari Israel. Turki ingin menjadi kekuatan regional yang lebih mandiri.

B. Strategi Al-Amiq Al-Istiraji

Masa depan politik luar negeri Turki di Era Kepemimpinan Erdogan berkaitan dengan Turki yang dikenal memiliki sejarah yang panjang mengenai keterlibatan dalam dunia politik internasional. Hal tersebut disebabkan wilayah Turki berada sangat strategis dalam percaturan politik dunia. Karena mengingat Turki pernah menjadi pusat pemerintahan yang besar seperti Kerajaan Romawi di Konstatinopel (Istanbul) dan juga Kerajaan Seljuk yang berpusat di wilayah Konya. Kemudian disusul dengan pemerintahan Republik Turki yang sangat modern dibandingkan dengan negara Arab lainnya. Sehingga tidak mengherankan jika Napoleon Bonaparte pernah berkata “jika dunia ini adalah sebuah negara maka Konstatinopel (Istanbul) adalah ibukotanya.

Perubahan politik luar negeri Turki dari pro Israel kepada politik luar negeri Turki yang pro Palestina disebabkan oleh persepsi atau pandangan politik luar negeri Turki di Timur Tengah berubah saat di bawah kepemimpinan Erdogan. Di bawah kepemimpinan Erdogan, Turki mencetuskan strategi yang dikenal sebagai **Al-Amq Al-Istratijii** (strategi politik intensif). Dimana politik ini menekankan kepada politik yang berpijak dari kondisi geostrategis Turki. Strategi Al-Amq Al-Istratijii atau strategi politik intensif merupakan strategi politik yang menekankan kepada politik yang berpijak dari kondisi geostrategis Turki dan sejarahnya yang panjang serta kebudayaan yang mendorong Turki menempati posisi strategis dalam panggung politik internasional, terutama di Timur Tengah. Dengan demikian, itulah strategi politik Turki yang baru, yaitu menjamin keselamatan dan keamanan nasional Turki tanpa melalui pembatasan dan pengisolasian diri, melainkan melainkan memiliki persepsi terhadap keterbukaan dan menerapkan politik *soft power* kepada negara tetangga. Perubahan orientasi kebijakan Luar Negeri Turki pada Barat mulai terlihat ketika beberapa kali Turki terlibat konflik dengan salah satu sekutu Barat yang berada di Timur Tengah, yaitu Israel. Negara Israel yang notabenenya adalah mitra Turki di Timur Tengah mulai terganggu kepentingannya ketika Turki ikut campur dalam konflik Palestina-Israel²⁹.

Kondisi geostrategis dalam **Al-Amq Al-Istratijii** Turki untuk perubahan politik luar negeri Turki dari pro Israel kepada politik luar negeri Turki yang

²⁹ www.academia.edu/.../Kebijakan_Turki_Memutus_Kerja., diakses 14 November 2016.

pro Palestina karena adanya perubahan orientasi politik luar negeri Turki yang dibagi menjadi domestik dan internasional. Keduanya diukur melalui mekanisme teori preferensi negara dengan menggunakan polar internal dan polar eksternal. Tingkat tinggi atau tidaknya sentralitas polar ini kemudian akan mengindikasikan distribusi kekuatan dalam lingkungan eksternal maupun internal Turki, semakin tinggi tingkat sentralitasnya, maka semakin terpusatnya suatu kekuatan dalam lingkungan tersebut, dan sebaliknya. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara³⁰.

Strategi politik intensif (**Al-Amq Al-Istratijii**) juga mempengaruhi pola hubungan atau interaksi ini yang dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan. Tentu yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerjasama. Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan. konflik (pertentangan) dan juga kompetisi (persaingan) merupakan hal-hal yang tidak mudah terhindarkan dalam interaksi hubungan internasional, meskipun awalnya terbentuk baik dalam suatu kerjasama sekalipun, tetapi jika salah satu pihak sudah merasakan adanya tekanan ataupun ancaman bagi dirinya, maka tidak menutup kemungkinan pertentangan itu pun akan muncul.

³⁰ <https://es.scribd.com/.../Kebijakan-Turki-Memutuskan-Kerjasam>., diakses 14 November 2016.

Strategi politik intensif (**Al-Amq Al-Istratijii**) juga mempengaruhi Masa depan politik luar negeri Turki di Era Kepemimpinan Erdogan yang sebelumnya Pro Israel Menjadi Pro Palestina ini dilandasi perubahan model pemerintahan dari Kesultanan Utsmani menjadi Republik Turki yang berhaluan sekuler di kawasan Timur Tengah. Menjadikan negara ini selalu merasa berhaluan Eropa daripada Asia, di antara negara-negara Arab lainnya. Sehingga tidak mengherankan, bahwa Turki sangat berkeinginan menjadi anggota Uni Eropa. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa ide sekuler telah membawa negara ini menuju kemodernan layaknya negara-negara di Benua Biru lainnya. Politik luar negeri Turki yang moderat dengan mengusung ide-ide republic membawa pengaruh hubungan yang cukup besar kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Eropa³¹.

Melalui strategi politik intensif (**Al-Amq Al-Istratijii**) dengan kekuatan politik yang terus mengalami kebangkitan, Turki tidak ragu-ragu lagi untuk menempatkan dirinya di tengah kontroversi besar. Turki adalah pemain besar dalam penciptaan perdamaian Arab Saudi dan Israel dan telah menengahi pembicaraan tidak langsung antara Suriah dan Israel. Selain itu, Turki juga berperan aktif ikut mengupayakan mediasi dalam mengatasi krisis nuklir Iran, dan Ankara mendukung armada yang baru-baru ini mencoba untuk memecahkan blokade Israel di Gaza yang secara langsung kesemuanya ikut menaikkan posisi tawar menawar Turki di antara negara-negara dunia. Kebijakan baru AKP yang condong ke Timur Tengah berpijak dari rasa

³¹ *Idem*, diakses 14 November 2016.

percaya diri tadi. Ketika PM Recep Tayyip Erdogan secara terbuka mengecam Israel, dia sejatinya tengah memalingkan perhatiannya kepada pasar Arab.

Sebuah analisis sederhana menyebutkan bahwa AKP dapat berpaling dengan cepat dari IMF karena milyaran dollar investasi Arab mengalir ke Turki. Pernyataan keras AKP selama insiden Gaza flotilla adalah bagian yang dapat digambarkan sebagai kebangkitan neo Usmanisme. Bangkitnya kelas politik-ekonomi baru ini dimotivasi oleh nilai-nilai tradisionalisme Islam dan kehausan mereka atas pasar-pasar baru. Raja Salman yang kini menjadi pemimpin terpopuler di Arab dan dunia Islam mendampingi popularitas pemimpin Turki Erdogan membentuk dua poros kebijakan yang memaksa membentuk peta jalan baru dalam dinamika politik dan sosial di Timur Tengah. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan secara terbuka mengkritik kebijakan Israel dan mendapat simpati dari dunia Arab. Sejak serangan militer Israel ke Jalur Gaza tahun 2008 dan 2009, Turki memang mulai menjauhkan diri dari Israel. Turki ingin menjadi kekuatan regional yang lebih mandiri.

Akan tetapi masa depan politik luar negeri Turki yang sebelumnya Pro Israel Menjadi Pro Palestina dalam diplomasi Timur Tengah, hubungan Turki dengan Israel akan dipisahkan dari hubungannya dengan Dunia Arab. Meskipun Turki menentang pembagian wilayah Palestina, akan tetapi tidak pernah menunjukkan permusuhan dengan negara Israel. Bahkab ia merupakan negara pertama di Timur Tengah yang memberikan pengakuan diplomatik kepada negara Yahudi tersebut. Pertimbangan agama tidak merusak hubungan persahabatan pada umumnya karena Turki sendiri mempunyai kebijakan

sekuler. Bahkan memiliki beberapa kesamaan dengan Israel. Perbedaan utamanya ialah bahwa Turki dengan tegas berada di pihak dunia bebas dalam persaingan Timur-Barat, sementara Israel masih hati-hati menentukan sikapnya untuk memilih salah satu dari dua blok tersebut. Hubungan Turki-Israel Maret 1949. Kerjasama diplomatik antara Turki dan Israel diberi prioritas tinggi oleh pemerintah kedua negara, yang berbagai keprihatinan sehubungan dengan ketidakstabilan regional di Timur Tengah.

Setidaknya dari tahun 2002-2010 Turki pada masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi/Justice and Development Party/Partai Keadilan dan Pembangunan*) yang dipimpinnya telah membawa perubahan luar biasa pada Turki, terutama sekali dalam percaturan hubungan internasional (politik Luar Negeri). Turki mampu merumuskan sebuah kebijakan luar negeri yang komprehensif, tidak terdiktomi dalam polar kekuatan dunia dan menekankan pada aspek *soft power* (kekuatan ekonomi-politik dan kebudayaan/pengetahuan).³²

Ahmet Davutoglu, Menteri Luar Negeri Turki menganggap bahwa Islam adalah ancaman bagi Barat. Huntington menganggap bahwa kompetisi dan konflik yang sebelumnya didasari kepada konflik Ideologi (liberalisme versus komunisme) akan digantikan dengan konflik antarperadaban (dalam konteks Turki adalah peradaban Islam versus peradaban Barat). Bahwa Turki berada dalam "masyarakat yang berada di ujung tanduk". Yaitu, Turki sekarang terbagi kedalam para elit politik yang condong kepada Barat (Uni Eropa) dan

³² Muhammad Dudi Hari Saputra, PM Turki Erdogan; dari Messiah menjadi Phariah, (Yogyakarta: (IRIB Indonesia), 2015).

sebagian masyarakat Turki yang lebih condong menganggap Turki adalah bagian dari negara Islam yang lebih dekat ke Timur Tengah.

Davutoglu membantahnya dan beranggapan bahwa peradaban di dunia ini tidak didasari oleh konflik atau benturan antarperadaban akan tetapi dialog secara komprehensif dan bentuk ini dibutuhkan untuk menciptakan keamanan dunia internasional, Turki seharusnya merangkul potensi ancaman dikawasan Timur Tengah, Asia, Balkan dan Trans-kaukasia menjadi partner strategis yang efektif dan aktif.

Setelah partai AKP berhasil menguasai Pemerintahan dengan Recep Tayyip Erdogan sebagai perdana menterinya, Davutoglu kemudian berusaha meningkatkan peranan politik luar negeri Turki sebagai jembatan/penghubung antara Asia dan Eropa serta Islam dan Barat, dengan pernyataanya sebagai menteri luar negeri Turki yang terkenal: *Turkey should act as a ?central country?, breaking away from a ?static and single-parameter policy? and becoming a ?problem solver? contributing to? global and regional peace?.*(Ahmet Davutoglu, 'Turkey's Foreign Policy Vision: an Assessment of 2007')

Davutoglu berpendapat bahwa Turki memiliki **posisi geografi yang strategis (Al-Amq Al-Istratijii)**, dengan konsep Strategic Depth (yaitu Memanfaatkan kelebihan Turki baik secara geografi, budaya serta pengaruh sejarah sebagai alat Turki dalam berinteraksi dalam kancah dunia Internasional). Bisa dikatakan strategi yang dipakai oleh Turki dalam kebijakan luar negerinya sesuai seperti yang dikatakan oleh Philip Robins

yaitu "a double-gravity state" sehingga Turki memiliki dua jaringan sekarang yaitu Komunitas Atlantik Eropa dan negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Kebijakan ini setidaknya melahirkan dua bentuk aksiologi, pertama adalah prinsip non-intervensi terhadap kebijakan dalam negeri negara lain dan *zero problems with neighbours* (kebijakan nir-masalah dengan negara tetangga).

Kebijakan yang diterapkan dari tahun 2002 sampai 2010 ini berhasil memberi dampak positif yang sangat signifikan untuk pertumbuhan kualitas ekonomi dan politik di Turki, Kebijakan bertetangga Turki dengan doktrin baru yang dibawa oleh pemerintahan Recep Tayyib Erdogan dengan partai AKP nya membuat hubungan Turki semakin erat dengan beberapa negara tetangganya termasuk beberapa negara tetangga yang dianggap sebagai "saingan" dari Eropa seperti Rusia, dan beberapa negara di Timur Tengah seperti Iran dan Suriah, bahkan mulai juga melakukan hubungan yang baik dengan wilayah otonomi Kurdi di Irak utara yang dalam beberapa dekade sempat memiliki hubungan yang buruk.

Hubungan yang baik antara Turki dengan Rusia dan beberapa di Negara di timur tengah bisa dilihat dari semakin meningkatnya kerja sama di bidang ekonomi. Sebagai perbandingan bisa dilihat dari angka total ekspor keseluruhan Turki ke negara-negara kawasan Timur Tengah pada tahun 2009 sebesar 20% dibanding pada 2004 yang hanya 12,5%, hubungan perdagangan dengan Iran meningkat lebih dari 6 kali lipat mencapai \$7,5 M pada tahun

2007 dan transaksi perdagangan dengan Suriah pun juga meningkat dari \$1,1 M pada tahun 2007 meningkat.

Namun itu terjadi pada 3 tahun yang lalu. Pada tahun 2011 Erdogan dan Davutoglu mulai membuka kotak pandora dan melakukan miscalculasi ketika melanggar doktrin luar negerinya sendiri dengan mulai ikut campur urusan dalam negeri negara tetangganya, yaitu Suriah. Pada tahun 2011 Erdogan menyatakan bahwa Bashar al-Assad sudah saatnya turun menjabat sebagai Presiden atas desakan "demokrasi" rakyat Suriah. Perkataan Erdogan itu menyulut hubungan Turki dengan beberapa pendukung setia Suriah rezim Bashar al-Assad seperti Rusia, Cina, Irak dan Iran (termasuk Hizbullah) menjadi renggang bahkan "panas".

Pada awalnya, Erdogan berharap manuver ini mampu mengukuhkan peran Turki sebagai negara yang pro-demokrasi di kawasan, sehingga mampu meningkatkan kredibilitas Turki terutama bagi negara-negara pendukung demokrasi (AS dan Uni Eropa). Namun di sinilah letak petaka itu berawal, Kevin Barret berpendapat bahwa Erdogan yang selama ini menganggap dirinya sebagai kepala negara Turki yang mampu mengharmonisasikan Islam dan demokrasi malah jatuh kedalam jebakan imprealisme/kapitalisme AS, Uni Eropa dan Zionis-Israel dalam kasus Suriah.

Turki yang sebelumnya terlihat sangat independen di dalam kebijakan luar negerinya, malah terlihat menjadi pion dari kekuatan imprealis AS dengan memutuskan untuk menjadikan wilayah perbatasan Turki-Suriah sebagai tempat pelatihan dan rekrutmen gerakan pemberontak Suriah, yang ternyata

membuat Turki bukan terlihat sebagai pendukung demokrasi di Timur Tengah melainkan terorisme. Karena gerakan "demokrasi" di Suriah telah dibajak oleh militan al-Qaeda yang bermotifkan sektarian.

Kebijakan gegabah Turki ini yang sebelumnya Pro Israel Menjadi Pro Palestina sudah cukup membuat sebagian masyarakat Turki anti-pati terhadap Erdogan. Namun hal ini semakin diperparah dengan kebijakan Erdogan yang kembali membuka kerja sama yang erat dengan Israel pasca menerima permintaan maaf Israel atas kasus Mavi Marmara (serangan pasukan Israel atas kapal bantuan Turki untuk Palestina). Sikap ini telah membuat kecewa negara-negara di kawasan Timur Tengah dan kelompok islamis di Turki.

Di dalam negeri sendiri, Erdogan memang dianggap mampu membuat Turki sebagai kekuatan ekonomi-politik di Timur Tengah dan Eropa, di saat negara-negara Eropa tertimpa krisis dan defisit pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009. GDP (gross domestic product) Turki mengalami peningkatan yang pesat, yaitu \$589 miliar dollar pada tahun 2000 menjadi \$991 miliar dollar pada tahun 2008, dan pendapatan turki adalah urutan ke 16 terbesar di dunia dan masuk ke dalam negara G-20. Dan pertumbuhan ekonomi Turki pasca krisis ekonomi 2008-2009 adalah yang tercepat pulihnya dengan pertumbuhan sebanyak 5%. Huseyin Bagci mengutarakan bahwa keberhasilan ekonomi yang diraih Turki di masa Erdogan inilah yang telah membuat Erdogan menjadi besar kepala. Erdogan mulai menunjukkan sikap otoriter dan merasa berhak mengatur rakyat Turki sekehendaknya. Hal ini membuat internal rakyat Turki mulai membencinya. Dan sekutu terdekat Turki, seperti

AS dan Uni Eropa pun mulai menunjukkan sikap aslinya terhadap Erdogan, yang mulai mengkritik dan meminta evaluasi atas kebijakan represif Erdogan kepada para demonstran.

Peristiwa taman Gezi yang dekat dengan lapangan Taksim pun menjadi momentum perlawanan rakyat Turki atas kepemimpinan Erdogan, dalam sudut pandang psikoanalisis Lacan; Erdogan sedang tunduk pada liyan (the other) akan dirinya sendiri, sebuah hasrat "aku" yang timbul karena rasa kekurangan (pesimistik) dan kemudian melahirkan sikap permintaan untuk menandai liyan akan dirinya melalui simbol-simbol penanda utama.

Diskursus sang penguasa Erdogan mendesakkan identifikasi nilai-nilai dan konsep tertentu sebagai landasan dan inti hidup sebagai penanda utama, yang diharapkan menjawab secara sistematis didalam sistem "hukum/kebijakan". Dalam kasus Erdogan penanda utama yang diambil adalah liyan berupa romantisme sejarah kekhalifahan Utsmani Turki yang mampu membawa bangsa Turki pada puncak kejayaannya berupa pembangunan kembali replika barak militer Utsmani (yang dihancurkan pada tahun 1940 oleh rezim Kemal Attaturk) dan dipadu dengan simbol kemakmuran ekonomi berupa pembangunan pusat perbelanjaan dan pemukiman elite. Pada dasarnya Erdogan sedang menyimbolkan dirinya sebagai bapak negara yang mampu mensejahterakan rakyat Turki sehingga pantas untuk dianggap sebagai Sultan.

Erdogan melakukan pendekatan Teosentris di dalam perencanaan pembangunan di taman Gezi. Teosentrisme adalah suatu pandangan yang

berdasarkan pada dogma agama yang menjadi kekuatan kekuasaan. Pada era kekhalifahan Utsmaniyah para ulama mempunyai kekuatan (*power*) yang mendukung sistem kekuasaan kesultanan/monarki, yang dipraktekkan dengan sistem militer. Perencanaan mempunyai peranan untuk memperkuat kekuasaan kesultanan. Pembangunan Kota diwujudkan sebagai artikulasi kepentingan pembangunan, tentara dan birokrasi. Muncullah sistem perencanaan yang disebut Authoritarian Planning. Tradisi ini ditandai adanya prioritas pembangunan lapangan untuk parade militer, boulevard, taman serta monumen sebagai simbol kekuasaan.

Taman Gezi pun akhirnya menjadi replika dan simbol utama pembangunan simbol romantisme dan kebangkitan kekhalifahan Turki era Utsmaniyah. Karena taman Gezi dan kawasan lapangan Taksim dianggap merupakan representasi simbol hegemoni sekularisme (Kemalis) yang harus ditata ulang untuk mewakili representasi rezim yang berkuasa sekarang, yaitu Erdogan dan AKP nya yang Islamis, yang kemudian dipadu dengan pembangunan pertokoan dan perumahan elite yang mewakili bentuk Neoliberalisme dari pemerintahan yang berkuasa sekarang.

Masa depan politik luar negeri Turki yang sebelumnya Pro Israel Menjadi Pro Palestina juga dipengaruhi oleh kondisi internal Turki. Perilaku otoriter rezim Erdogan dan identitas simbol yang coba dilakukan oleh rezim Erdogan pun akhirnya mendapat perlawanan keras oleh rakyatnya sendiri, yang pada awalnya dari basis aktivis lingkungan Turki karena menganggap bahwa Taman ini adalah satu-satunya kawasan hijau dikawasan lapangan

Taksim, dan kemudian menjadi momentum perlawanan aktivis dari berbagai kalangan termasuk gerakan perlawanan para Kemalist (pendukung sekuler) karena perencanaan pembangunan replika barak militer Utsmaniyah (simbol kubu konservatif-islamistis), kemudian oleh kalangan anti-kapitalis/neolib dan kalangan terpinggirkan (buruh, bahkan termasuk kalangan islamistis) karena pembangunan pusat perbelanjaan dan kompleks perumahan elite (simbol kapitalisme/neoliberalisme), serta kalangan yang tidak puas dengan perilaku otoriter rezim Erdogan yang menyebut Erdogan adalah otoriter dan ingin menjadi Sultan, yang akhirnya membuat aksi demonstrasi menyebar ke seantero wilayah Turki.

Erdogan yang pada awalnya dianggap berhasil dan menjadi pahlawan (Messiah) baik di tataran internal maupun eksternal negaranya, mulai mengalami masa pesakitan (Phariah). Erdogan pada tataran eksternal negaranya sudah gagal dalam kasus Suriah yang membuat hubungan Turki semakin renggang dengan Suriah, Rusia, Irak, Lebanon, Iran dan Cina. Begitu pula di internalnya, Erdogan dibenci oleh kalangan Kemalist, aktifis lingkungan, dan anti-kapitalis. Baru-baru ini BBC mengabarkan bahwa pemerintahan Turki bersedia untuk menunda pembangunan ulang taman Gezi, sambil menunggu keputusan hukum apakah pemerintah memiliki legalitas untuk melakukan pembangunan ulang atau tidak. Patut dinantikan, apakah demonstrasi rakyat Turki akan berhenti atau tidak dalam menyikapi keputusan Erdogan ini, jika masih berlanjut. Maka dapat dipastikan bahwa aksi demonstrasi di Turki tidak hanya terkait penolakan pembangunan ulang taman

Gezi (isu populis), melainkan penolakan atas berkuasanya rezim Erdogan untuk terus berkuasa (isu strategis dan ideologis).³³

³³ Muhammad Dudi Hari Saputra *Op. Cit.*